

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda, Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Sinar Grafika
- Basrief, Arif. 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. (Kapita Selekt), Jakarta: Adika Remaja Indonesia
- Baharruddin, Lopa. 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Chazawi, Adami. 2017. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darji Darmodiharjo. 1995. *Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kristian dan Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti
- Marzuki, Mahmud Pieter. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purwaning, Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Alumni: Bandung.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Setyawati, Deni. 2008. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur
- Soekanto dan Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali
- Sudargo, Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni: Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zaeni, Asyhadie. 2016. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tim Redaksi Pustaka Timur. 2008. Kasus BLBI ''Tragedi korupsi terbesar di Indonesia'': Yogyakarta: Pustaka Timur.

SKRIPSI

Fauzul romanzah, 2007 ''Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Yudi Wibowo Sukinto, 2016, ''Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

INTERNET

Barda Nawawi Arief, 2013, Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer, Surabaya, diakses dari http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/en/files/Materi/MIL01/MIL_BARD_A_TPP.pdf 28 Desember 2015

Haswandi, 2006, Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi harus/dikembalikan./Diakses/dari www.hariandialog.com/indeks.php:apar-at-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan 15 April 2016

Muhammad ahsan thamrin, 2018 masalah pengembalian kerugian negara dalam perspektif undang-undang keuangan negara dan undang-undang tindak pidana/korupsi/diakses/dari. <http://googleblight.com/i/http://muhammadahsanthamrin.blogspot.com/2018/02/masalah-pengembalian-kerugian-negara>. 18 Februari 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945.

Rancangan Kitab Undang-Undang Perampasan Aset

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

